



Perlu Rapikan Data Wajib Pajak

■ DPRD Kota Yogya Sikapi Potensi Pemangkasan Dana TKD Rp200 Miliar

YOGYA, TRIBUN - Kota Yogyakarta dihadapkan kepada ancaman pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang. Kalangan legislatif pun menyalakan alarm, seiring dana transfer ke daerah (TKD) yang dipangkas kemungkinan bakal mencapai Rp200 miliar.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, menyebut, Kota Yogyakarta belum mandiri secara fiskal, dan masih sangat bergantung kepada kurungan dana pusat. Bukan tanpa alasan, legislatif memaparkan, sampai sejauh ini, pendapatan asli daerah (PAD) baru menyumbang di bawah 50 persen dari total APBD.

Sehingga, di tengah ancaman pemangkasan TKD, pilihannya menyoroti satu masalah krusial yang selama ini menghambat optimalisasi pendapatan. Yakni, data wajib pajak yang carut-marut dan tumpang tindih antarinstansi. Menurutnya, mustahil memetakan dan menggenjot potensi PAD tanpa data wajib pajak yang valid dan bersifat tunggal.

"Kami memandang, untuk potensi PAD itu perlu data yang valid mengenai wajib pajak. Data itu seharusnya bersifat tunggal," ucapnya, Minggu (2/11).

Ia memberi contoh, berdasar data yang dihadapinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat ada sekitar 600 wajib pajak hotel dan restoran. Namun, Dinas Pariwisata justru memiliki data dengan jumlah yang lebih sedikit. Tidak berhenti di situ, kekacauan data juga terjadi di sektor lain seperti usaha hiburan, jasa parkir, reklame, dan sebagainya. Munazar bilang, jika seti-

GENJOT PENDAPATAN

- Kota Yogyakarta dihadapkan kepada ancaman pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang.
- Kalangan legislatif menilai Kota Yogya masih sangat bergantung kepada kurungan dana pusat, sehingga perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
- Satu di antara cara menggenjot PAD adalah dengan mengatasi kacau data wajib pajak yang saling berbeda antarinstansi terkait.

ap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki data sendiri-sendiri, proyeksi pendapatan daerah akan selalu meleset dan sulit dipertanggungjawabkan. "DPMPTSP apakah bisa membuat data tunggal? Berapa yang benar-benar mengantongi izin, berapa yang tidak bertzin namun tetap beroperasi dan dipungut pajak," ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Mohammad Sofyan, berharap, sektor PAD dapat digenjot melalui berbagai inovasi agar potensinya bisa dikejar. Baik melalui intensifikasi (pena-gihan yang lebih ketat), eks-tensifikasi (menjaring wajib pajak baru), maupun opti-malisasi aset-aset milik da-erah yang selama ini masih 'tidur'.

"Harapannya, PAD bisa berada di kisaran 60 atau bahkan 70 persen. Ini untuk dapat memperkuat kemandirian fiskal dan mengu-rangi ketergantungan dana

pusat," urainya.

Efisiensi

Untuk diketahui, Pemkot Yogyakarta berencana melaku-kan efisiensi besar-besaran belanja modal atau ang-garan pembangunan fisik di 2026, mengantisipasi pemotongan dana TKD dari pusat. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan, efi-siensi ini akan menyasar proyek-proyek seperti pem-bangunan atau perbaikan infrastruktur dan jalan.

"Yang diefisiensikan, ya belanja modal. Beberapa ke-giatan yang sifatnya belanja modal itu tidak akan direa-lisasikan dulu," ujarnya, be-lum lama ini.

Menurut Wali Kota, Pem-kot Yogyakarta sudah mem-perkirakan, dana transfer pusat yang diterima bisa berkurang hingga kisaran Rp250 miliar. Jumlah itu setara dengan 21-26 persen dari total alokasi yang biasa diterima pada tahun-tahun sebelumnya. "Kalau seandainya dipotong 21 persen sampai 26 persen, berarti berkurangnya sekitar Rp250 miliar. Itu estimasi kami, ka-rena DIPA yang pasti belum turun," kata Hasto.

Meskipun harus memang-kas anggaran, ia memasti-kan bahwa belanja untuk pendidikan dan kesehatan tidak akan terpengaruh. Se-bab, kedua sektor tersebut, termasuk dalam kategori *mandatory spending* atau belanja wajib yang alokasi-nya dilindungi aturan. Seba-gai informasi, alokasi untuk pendidikan dan kesehatan ini bahkan bisa mencapai 47 persen dari total keseluruh-an anggaran.

"Pendidikan tidak (terke-na pengurangan) karena itu sudah wajib dialokasikan. Malah ada penambahan, termasuk kesehatan," jelas-nya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005